

## Lembar Fakta Nasional

### **Mewaspada Ijon Politik Pertambangan pada Pemilukada Serentak 2017**

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak pada Februari 2017 tidak akan menyelesaikan persoalan masyarakat di daerah tambang. Pemilukada ini tidak lebih dari sekadar ajang merebut kuasa dan jabatan bagi segelintir elit dan politisi untuk terus mengakumulasi kapital keuangan bagi diri sendiri, kelompok mereka dan partai politik. Lebih dari itu, pesta lima tahunan ini juga momentum bagi para pebisnis berbasis lahan skala besar yang sedang mencari jaminan politik dalam melanggengkan usaha mereka di daerah tambang.

Catatan JATAM per Desember 2016, wilayah daratan dan perairan kepulauan Indonesia telah dikavling oleh 10.388 IUP atau 44 persen dari luas negara ini. Belum lagi dengan konsesi industri ekstraktif lainnya seperti konsesi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri atau bahkan HPH atau sekarang dikenal sebagai IUPPHK.

Daya rusak tambang menjadi konsen amatan JATAM. Rentetannya mulai dari pembunuhan dan kekerasan. Catatan JATAM, sepanjang 2009 - 2016 terdapat 29 orang tewas, 153 luka - luka dan 219 mendapat kekerasan lain dan intimidasi. Ini belum termasuk korban - korban anak dan warga tewas di lubang Tambang yang terjadi di Kalimantan Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia.

Fakta lain yang mencuat adalah penggusuran, pencemaran lingkungan hingga penghancuran ruang hidup warga. Selain itu, tambang juga menjadi rumah korupsi dan manipulasi, seenaknya merambah Hutan Konservasi, mudah mengotak - atik perubahan status kawasan hutan untuk melancarkan operasinya. Contoh kasus terkait hal ini adalah seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan

Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati dan Gubernur ditangkap KPK karena terlibat korupsi SDA.

Di Banyuwangi, Tambang Emas PT. BSI dan di Sultra Tambang PT. AHB dapat mengotak - atik status kawasan hutan Lindung, PT. Soe Makmur Resources, di Timor Tengah Selatan, NTT juga sama, menambang mangan di kawasan hutan lindung tanpa mengantongi IPPKH (2010-2014).

Bahkan saat ini, 1,2 juta hektar Tambang Minerba Tumpang tindih dengan Hutan Lindung di 12 Provinsi di Indonesia, 54 ribu hektar Tambang Minerba Tumpang tindih diatas kawasan Hutan Konservasi kemudian 12,4 juta hektar tumpang tindih dikawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi yang Bisa Konservasi dan Hutan Produksi Terbatas.

Sebanyak 83 persen dari 10.388 IUP di seluruh Indonesia tidak membayar dana jaminan reklamasi dan meninggalkan ribuan lubang bekas tambang, tak terpulihkan dan membebani keuangan negara.

Daya rusak tambang tersebut dipastikan akan menghebat pasca pemilu pada serentak 2017, mengingat investasi berbasis lahan skala besar ini terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perizinan di tahun menjelang, saat berlangsung dan selepas Pemilu.

Laporan dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) berjudul, "*Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015*", memaparkan, biaya yang dibutuhkan untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi Gubernur bisa mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar. Selanjutnya, Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menunjukkan total

harta kekayaan calon Kepala Daerah pada 2015 rata-rata hanya mencapai Rp 6,7 miliar.

Kekayaan para calon kepala daerah ternyata tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi PemiluKada langsung. Sehingga untuk menutupi kebutuhan biaya tersebut para kandidat giat mencari sponsor.

Para pebisnis melihat persoalan di atas sebagai salah satu celah untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka. Salah satu pendekatan yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah dengan menunggangi dan mengendalikan para kandidat melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye sebagai praktik ijon politik. Maka investasi berbasis lahan skala besar adalah bentuk hubungan saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan politisi. Modal finansial untuk kebutuhan politik PemiluKada ditebus dengan jaminan politik untuk pemberian ataupun pengamanan konsesi perizinan. Herry Purnomo dalam *paper* berjudul "Kabut Asap, Penggunaan Lahan dan Politik Lokal" (2015) menegaskan bahwa ada keterkaitan erat antara Pilkada yang berlangsung di suatu wilayah dengan peningkatan jumlah titik panas kebakaran lahan. Hal ini menunjukkan bahwa PemiluKada erat pula kaitannya dengan "bagi-bagi" konsesi perizinan, di mana hal tersebut menyebabkan perubahan peruntukkan lahan secara massif.

Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, pada 2009 tercatat mengeluarkan 93 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kemudian pada 2010, tahun saat kabupaten tersebut melaksanakan PemiluKada, tercatat 191 IUP baru dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, dua kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Contoh lain terjadi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tercatat penerbitan 54 IUP baru pada 2010, satu tahun setelah pelaksanaan PemiluKada

2009. Di mana Kabupaten Belu pada tahun sebelumnya hanya menerbitkan tujuh IUP saja. Kecenderungan tersebut juga terjadi di beberapa kabupaten lain seperti Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Kutai Barat (Kalimantan Timur), Tebo (Jambi), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Bengkulu Tengah (Bengkulu), dan beberapa daerah lainnya. Temuan ini bukan karena kebetulan, tetapi menunjukkan bahwa ijon politik sangat kental dalam proses Pemilukada.

Parahnya, Pemilukada Serentak dengan biaya yang demikian besar cenderung keluar dengan pesan-pesan kampanye yang tidak menggambarkan kekhasan daerah, baik dari segi potensi maupun permasalahannya. Sekiranya diamati dari satu daerah ke daerah lain yang menyelenggarakan pemilukada serentak, kemungkinan besar akan ditemukan pesan-pesan kampanye yang hampir sama, hanya berbeda wajah para kandidat pada poster dan baliho kampanye.

Sementara beragam krisis yang dirasakan masyarakat tidak muncul dalam pesan-pesan kampanye. Prosedur demokrasi yang berlangsung masih terputus dari harapan rakyat untuk terbebas dari krisis, yang ada hanya menjembatani kepentingan politisi dan pelaku bisnis melalui ijon politik. Tak heran jika para pemenang Pemilukada memiliki tanggungjawab yang lebih berat pada pemodal sebagai penyokong dana ketimbang rakyat pemberi suara. Akibatnya, selepas Pemilukada, muncul bagi-bagi konsesi lahan untuk kepentingan investasi berbasis lahan seperti tambang dan sawit.

Padahal, beragam krisis di daerah lingkaran tambang begitu nyata terjadi. Di Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya, 94 persen dari kabupaten ini sudah menjadi kawasan pertambangan dan migas. Kota Samarinda, pertambangan mengepung 70 persen dari total luas kota. Di Bengkulu Tengah, 52 persen wilayahnya juga sudah dikavling tambang. Akibatnya, kawasan pangan pun terancam. Di Bangka Belitung 77 persen beras didatangkan dari pulau lain, akibat izin - izin tambang yang

diterbitkan pemerintah mengubah kawasan pertanian. Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pegunungan Kendeng sebagai sumber air utama pertanian masyarakat juga diberikan kepada pertambangan batu gamping dan pabrik semen.

Selain sempitnya ruang hidup, krisis lain yang terjadi adalah terancamnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat. Di Kabupaten Kampar, Riau, tradisi Lubuk Larangan yang erat kaitannya dengan konservasi, keberadaan ikan-ikan di Sungai Kampar terancam oleh tambang di hulu sungai. Sementara di Lembata, Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan tradisi penangkapan ikan paus, delapan dari sembilan kecamatan di wilayahnya terancam ditambang. Ancaman ini tentu saja mempertaruhkan masa depan masyarakat Lembata yang 90 persen bergantung pada pertanian dan hasil laut.

Para pemimpin daerah yang lahir dari banyak Pemilukada tersebut makin jelas tidak memperjuangkan agenda krisis yang dialami masyarakat. Sebaliknya mereka justru memperjuangkan keamanan investasi dari pemilik modal, sponsor mereka. Padahal, di Kabupaten Tebo, misalnya, pertambangan hanya menyumbang delapan persen pada pendapatan daerah, sedangkan pertanian mampu memberi hingga lebih dari 50 persen.

Menurut Catatan JATAM sebagian besar pesan-pesan kampanye dalam Pemilukada disusun dengan mengacu pada identifikasi masalah yang generik dan tidak mencerminkan realitas krisis yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Identifikasi masalah yang generik mencakup rendahnya sumber daya manusia, pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan kesehatan. Sementara, potret krisis yang sudah diuraikan di atas masih belum digunakan dalam penyusunan pesan-pesan kampanye, termasuk visi dan misi calon kepala daerah yang akan menjadi ruh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan jika mereka terpilih. Pemilukada Serentak di wilayah

lingkar tambang tidak lebih dari upaya melanggengkan kekuasaan dan investasi berbasis lahan skala besar, tanpa membahas urusan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya.

Dikeluarkan oleh

**Jaringan Advokasi Tambang ( JATAM ) Nasional, Februari 2017**

Kontak

**Melky Nahar ( Kepala Kampanye Nasional ) - 0813 3803 6632**

**Merah Johansyah ( Koordinator Nasional ) - 0813 4788 2228**